

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Implementasi Kebijakan Dana Desa (Studi di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara)

Polii Einjelheart Hansiden ^a

^a Universitas Negeri Manado
 email: ^a heartpolii@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi kebijakan dana desa dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 belum sesuai prioritas penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta terdapat 4 faktor kunci yang menghambat keberhasilan kebijakan ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi belum efektif dan menjadi penghambat keberhasilan kebijakan dana desa. Untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan perihal mengimplementasikan kebijakan, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan 4 faktor kunci sesuai yang dikemukakan Edward III agar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan efektif dan lebih efisien.

Kata Kunci: Analisis, Implementasi Kebijakan, Dana Desa

Village Fund Policy Implementation (Study in Lansot Village, North Minahasa Regency)

Abstrak

This study aims to describe, and analyze the implementation of village fund policies and the inhibiting factors in implementing village fund policies in Lansot Village, North Minahasa Regency. The method used in this research is a qualitative research method. The results of this study concluded that the implementation of the priority use of village funds for the 2015 fiscal year was not in accordance with the priority use for development activities and empowerment of rural communities and there were 4 key factors that hindered the success of this policy, namely communication, resources, disposition/attitude of implementers, and the ineffective bureaucratic structure. and become an obstacle to the success of the village fund policy. To solve problems in the field regarding implementing policies, local governments are required to optimise the 4 key factors as stated by Edward III so that the policies that have been made by the government can be implemented effectively and more efficiently.

Keywords: Analysis, Policy Implementation, Village Fund.

A. PENDAHULUAN

Salah satu poin Nawacita Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran/desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari

pembangunan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang disalurkan ke 74.093 Desa di seluruh Indonesia (Kemendagri, 2015). Tahun 2015 adalah awal kebijakan Dana Desa, Desa Lansot sendiri menerima kucuran dana sebesar Rp. 277.250.000, (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dan dari kajian awal penulis dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Lansot terdapat kesenjangan antara

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

prosedur dan proses antara lain: (1) Minimnya pengetahuan *street level bureaucrats* (perangkat desa) sebagai aktor dan implementor kebijakan dalam penyusunan APB Desa khususnya dalam pembuatan Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang menyebabkan keterlambatan pelaporan; (2) APB Desa tidak sesuai dengan kebutuhan Desa Lansot contoh: Infrastruktur Desa minim, jumlah penduduk miskin masih tinggi, namun yang menjadi prioritas pembangunan adalah Renovasi Kantor Desa; (3) Lemahnya SDM aparatur desa, kurang paham aturan LPJ Keuangan Desa, kurang pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menyebabkan LPJ belum sesuai standar manajemen pertanggungjawaban dan rawan manipulasi sehingga fungsi LPJ hanya sebagai syarat administrasi saja mengesampingkan kebenaran substansi dan fungsi utama dari LPJ itu sendiri sebagai bukti akuntabilitas. Dari penelitian terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melihat dari Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperlihatkan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan (Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, 2017). Sedangkan (Mustanir, 2016) mengambil Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dari hasil survey terkait pencapaian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan (Hidayah, N., & Wijayanti, 2021) melihat dari perspektif akuntabilitas pengelolaan dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Kebaruan penelitian ini yaitu mencari deskripsi dan analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa (Studi di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara) dengan kajian analisis normatif serta penggunaan teori George Edward III (Edwards, 1980).

B. PEMBAHASAN

Penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin,

2011). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam/indepth interview menggunakan pedoman wawancara dengan informan kunci Hukum Tua (Kepala Desa). Wawancara dilakukan dengan mendapatkan keakraban yang kuat dengan terus mengikuti apa yang dikatakan Benny dan Hughes untuk menghargai nilai wawancara sebagai alat pengumpulan data (Pangkey & Sendouw, 2020), peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat (Polii, 2021).

Untuk membatasi penelitian sehingga tidak terjebak pada bidang umum dan luas yang kurang relevan dan akhirnya menjadi bias juga mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis maka penulis hanya memfokuskan pada:

1. Bagaimana analisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara. Untuk membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan Desa. Pemerintah mengambil kebijakan PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dimana pada pasal 19 memerintahkan menteri terkait untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan dana desa. Menteri Desa PDTT pada saat itu lalu mengeluarkan Permendes PDTT 5/2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Agar peneliti dapat mengakomodir prioritas yang tercantum dalam kebijakan tersebut peneliti mengambil dua indikator yang dapat menjabarkan permasalahan yaitu: (1) pembangunan desa; (2) pemberdayaan masyarakat
2. Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan dana desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara, menggunakan teori George Charles Edward III. Dilihat dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap),

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

dan struktur birokrasi para implementor dalam mengimplementasi kebijakan.

Fokus I: Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan hasil kajian penulis bahwa prioritas penggunaan dana desa dengan Permendes PDPT no 5 tahun 2015 yaitu: (1) Pembangunan Desa dapat disimpulkan indikator prioritas penggunaan untuk bidang pembangunan belum sesuai dengan Permendes PDPT 5/2015 karena kurangnya pemahaman aparat tentang permendes PDPT 5/2015. (2) Dari temuan diatas jelas dilihat kesenjangan yang terjadi terkait kegiatan yang dibiayai untuk pemberdayaan masyarakat belum sesuai prioritas penggunaan dalam permendes PDPT 5/2015, pemerintah desa dan pelaksana kurang pemahaman tentang Permendes PDPT 5/2015, dan salah dalam pendistribusian komponen sehingga anggaran berada pada pos yang tidak tepat.

Fokus II: Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara

Empat indikator yang menghambat keberhasilan dari sebuah pengimplementasian kebijakan oleh implementor kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Yalia, 2014). Dari data hasil penelitian mengungkap bahwa keempat faktor menghambat keberhasilan Implementasi Dana Desa ini sebagai berikut:

1. Komunikasi: Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah belum dapat menjelaskan substansi dana desa ini pada aparat maupun masyarakat sehingga perangkat belum paham aturan terkait dana desa alhasil realisasi prioritas penggunaan anggaran belum sesuai dengan Permendes PDPT 5/2015 dan juga masyarakat belum tahu kejelasan tentang dana desa digunakan untuk pembiayaan apa saja. Seharusnya dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa juga dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pemerintahan desa sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sudah terpenuhi serta ada persetujuan dari bupati/walikota.

2. Sumber Daya: Kurangnya peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi agar tersedianya fasilitator dalam hal ini pendamping, juga rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas dan kapabilitas perangkat desa, dihasilkan dengan belum pahamnya perangkat dan pelaksana terkait peraturan dana desa ini.
3. Disposisi (sikap pelaksana): Pelaksana perangkat dan tim pelaksana kegiatan (TPK) kurang memahami tujuan penggunaan dana desa ini, Pemerintah kabupaten dan desa belum terbuka terkait informasi dana desa, sikap acuh tak acuh aparat desa mengesampingkan substansi sekalipun pembangunan belum sesuai prioritas.
4. Struktur Birokrasi: Kurangnya pengawasan dan koordinasi pemkab terkait pelaksanaan penggunaan dana desa, dan pembimbingan teknis yang dilakukan terlalu teoritis, perangkat dan pelaksana cenderung mengesampingkan kebenaran substansi dalam pembuatan laporan realisasi sebagai bukti akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Lansot.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara belum sesuai dengan Permendes PDPT nomor 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa dan terdapat 4 faktor penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Lansot yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap pelaksana), dan Struktur birokrasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas agar tercapainya tujuan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta penilaian terkait Dana Desa yang berkesinambungan dan terintegrasi, prioritas penggunaan Dana Desa wajib mengikuti aturan terkait prioritas untuk menunjang stabilitas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta keempat faktor penghambat ini perlu diperbaiki agar dapat terlaksana dengan efektif sehingga menjadi faktor kunci keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Lansot Minahasa Utara. Dan dari saran ini mengundang para peneliti untuk

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

melanjutkan penelitian yang berisi substansi yang sama dibidang Dana Desa.

REFERENSI

- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*. <https://doi.org/10.1002/jcc.21776>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2). <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/77>
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik.*, 4(2).
- Pangkey, I., & Sendouw, R. (2020). Interconnection of Prime Service on Organization's Public Sector: A Study on Department of Demography and Civil Record of Manado City's Government North Sulawesi Province. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(03), 2128-2133. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i3/pr200960>
- Polii, E. H. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-25>
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149-160.